Bali Post

Cair, Dana Pengamanan Pilwali

Denpasar (Bali Post) –

Usulan untuk melakukan pencairan dana pengamanan pemilihan wali kota (pilwali) Kota Denpasar, akhirnya direalisasikan. Buktinya, Pemkot Denpasar telah mencairkan dana sebesar Rp 2,6 miliar kepada kepolisian.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Denpasar I.B. Rahoela, Selasa (20/10) kemarin mengatakan, dana pengamanan pilwali sudah cair. Pencairan dana itu telah dilakukan bagian keuangan. "Dana pengamanan pilwali sudah ditransper kepada instansi terkait per 19 Oktober 2015," katanya.

Lambatnya pencairan dana ini, katanya, karena dana itu dianggarkan dalam APBD Perubahan sehingga Oktober baru bisa ditindaklanjuti. Alotnya pencairan dana ini tidak terlepas dari banyaknya syarat administrasi yang harus dilengkapi. "Selama syaratnya belum lengkap, bagaimana kita bisa mencairkan dana itu," kata Rahoela.

Rahoela berharap dengan cairnya dana ini, dapat bermanfaat bagi pengamanan pilwali mendatang. Karena pesta demokrasi ini rawan menimbulkan gangguan kamtibmas. Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Demokrat A.A. Susruta Ngurah Putra dan Ketua Fraksi Hanura DPRD Denpasar IB Ketut Kiana berharap agar dana tersebut segera dicairkan. "Proses pilwali sudah berjalan. Karena itu, anggaran dana pengamanan harus segera dicairkan," kata kedua wakil rakyat ini.

Susruta menyebutkan, dukungan pengamanan pada saat pilwali sangat strategis. Karena itu, pihaknya mendesak agar pencairan dana-dana pendukung itu harus segera direalisasikan. Terlebih, saat ini telah memasuki masa kampanye yang rentan terhadap gangguan kamtibmas. "Kami berharap proses pilwali ini tidak sampai mengganggu keamanan, namun antisipasinya harus tetap menjadi perhatian," ujar Kiana.

Disebutkan, dalam APBD Induk dan Perubahan yang telah ditetapkan, jumlah dana yang dialokasikan untuk kelancaran pilwali cukup besar. Dana yang dialokasikan ke KPU mencapai Rp 16,6 miliar, Panwas dialokasikan sebesar Rp 4,2 miliar, polisi mendapat alokasi anggaran Rp 2,6 miliar dan TNI sebesar Rp 548 juta. "Ini yang sudah ketok palu, kalau ada perubahan saya tidak tahu," jelas Susruta. **(kmb12)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 2

Bali Post

Dana Hibah Tak Cair ✓

Dewan "Serang" Penjabat Bupati

Mangupura (Bali Post) –

Kekesalan wakil rakyat di DPRD Badung terhadap sikap eksekutif yang terkesan pasif terhadap masalah pencairan hibah makin menjadi-jadi. Bahkan, pada rapat kerja (raker) antara Banggar DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (20/10) kemarin, dewan "menyerang" eksekutif dengan segudang pertanyaan hingga tak berkutik.

Eksekutif yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka dan Sekda Kompyang R Swandika dibombardir pertanyaan seputar pencairan dana hibah dewan yang selama ini belum terealisasi. "Saya tidak mengharapkan ganti rugi apa pun. Saya sudah keluar uang Rp 400 juta untuk menepati janji proposal hibah yang sudah diajukan. Pak penjabat yang saya hormati, hibah ini untuk rakyat, sepeser pun tidak ada kami makan," tegas anggota Fraksi Golkar Wayan Suyasa dengan nada tinggi.

Suyasa dalam rapat tersebut juga terang-terangan mengaku mengalami kerugian akibat ngadatnya pencairan hibah tersebut. Sebab, pihaknya harus mengeluarkan dana pribadi lantaran harus menepati janji kepada masyarakat. "Saya telah mengeluarkan uang Rp 400 juta. Bahkan, ada anggota dewan yang mengeluarkan uang hingga Rp 800 juta," ucapnya.

Komentar anggota Fraksi PDI-P Made Sumerta juga tak kalah pedas. "Semua sudah diteken, tetapi tidak ada cair. Jadi, semua ini adalah akumulasi kemarahan kami sebagai wakil rakyat," katanya.

Wayan Sandra, politisi senior PDI-P lainnya, juga mengatakan bosan melihat masalah hibah yang tak kunjung ada titik terang. "Saya sudah malas sebenarnya masalah hibah ini. Mau bagaimana lagi? Penjabat bupati yang harusnya tanda tangan malah takut," sentilnya.

Selain hibah, dewan kembali mempermasalahkan munculnya angka Rp 37 miliar di RAPBD Badung 2016. Angka itu disebut angka siluman karena tanpa sepengetahuan dewan. "Mohon dijelaskan angka Rp 37 miliar itu dari mana dan untuk apa saja," pinta Sunarta.

Sekda Kompyang R Swandika menjelaskan, angka Rp 37 miliar didapat dari sisa Silpa tahun anggaran sebelumnya. Dana itu digunakan untuk belanja yang dinilai penting. "Jadi, walau sudah diteken KUA/PPAS, bukan berarti dikunci untuk revisi. Kami belanja untuk hal yang penting dan mendesak," paparnya.

Dijelaskan lebih jauh, salah satu belanja yang besar adalah pembelian mobil pemadam kebakaran (damkar) senilai Rp 14 miliar. Selain damkar, dana Rp 37 miliar juga digunakan untuk membuat kelas baru di beberapa sekolah. "Selama ini armada damkar di Badung sudah banyak, tetapi tidak ada yang bertangga. Jadi, kalau ada kebakaran gedung berlantai kami tak berdaya," ujarnya.

Sementara itu, Yudha Saka menjawab pertanyaan dewan dengan jawaban normatif. Pria asal Buleleng ini menjawab pertanyaan terkait hibah dengan kalimat singkat dan pendek. "Bukan masalah takut atau berani, tetapi ini sudah ada surat edaran dari Mendagri. Jelas dalam surat tersebut, penerima hibah harus berbadan hukum nasional," sebutnya.

Pihaknya berjanji akan mengalihkan proposal dana hibah yang difasilitasi dewan masuk dalam APBD Desa (APBDes). Selain APBDes, proposal juga akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Sebenarnya ini masalah nasional, tidak hanya di Bali. Seluruh Indonesia juga sudah seperti ini. Berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ini banyak yang tidak *ngeh* (paham - red)," ujarnya.

Di sisi lain pada RAPBD tahun 2016, justru eksekutif memasang tambahan kesejahteraan PNS nyaris setengah triliun yaitu Rp 408 miliar, melonjak cukup besar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 311 miliar. Sedangkan hibah tahun 2015 masih ada sekitar Rp 239,9 miliar atau 1.207 proposal yang masih belum cair. **(kmb27)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 3

Bali Post

Dari Interaktif Radio "SWiB" – Diskominfo

Dana Desa Baru Terealisasi Tiga Persen

Amlapura (Bali Post) -

Dari rencana dana desa dari pemerintah pusat yang diwacanakan tiap desa mendapat Rp 1 miliar, kini baru terealisasi tiga persen. Namun, total dana ke masing-masing desa sudah mencapai Rp 2 miliar.

Hal itu disampaikan Kabid Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Karangasem Komang Subadra, Selasa (20/10) kemarin saat tampil sebagai narasumber dialog interaktif bertema UU Tentang Desa. Dialog interaktif dalam rangka penyebarluasan informasi publik itu kerja sama Radio *SWiB FM* dengan Diskominfo Karangasem.

Subadra mengakui dulu memang ada wacana tiap desa bakal diberikan Rp 1 miliar. Itu sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, di mana dana desa dari APBN minimal 10 persen. Namun sampai kini, terealisasi baru sekitar tiga persen, diduga karena di pusat masih kesulitan anggaran. "Informasinya 2017 baru mendapatkan 10 persen dana desa," katanya.

Subadra mengatakan, total dana desa yang diterima Pemkab Karangasem Rp 21 miliar. Demi keadilan 90 persen dana dibagi rata 75 perbekelan. Sisanya 10 persen dibagi sesuai syarat tertentu, seperti memerhatikan luas wilayah desa, kemiskinan dan banyaknya penduduk. Berdasarkan kriteria itu, per desa mendapatkan dana desa berkisar Rp 300 juta. "Dengan sistem pembagian dana desa itu 90 persen dibagi rata tiap desa, sisanya 10 persen mempertimbangkan hal lain, menjadi lebih merata. Dulu pada saat sistem alokasi dana desa, ketimpangan mencolok. Desa yang kecil mendapatkan hanya Rp 35 juta, desa yang luas dan penduduknya banyak seperti Bunutan bisa dapat sampai sekitar Rp 500 juta," paparnya.

Sementara itu, Perbekel Bebandem I Gede Partadana, S.H. yang menjadi narasumber pada dialog itu, menyampaikan Desa Bebandem baru mendapatkan Rp 299 juta dari dana desa. Dana desa itu sesuai ketentuan boleh dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di desa, serta kegiatan perekonomian.

Ditambahkan Komang Subadra, meski dana desa pemerintah pusat baru tiga persen, tetapi sumber dana lain sudah banyak ke desa. Total tiap desa di Karangasem kini diperkirakan sudah masuk sekitar Rp 2 miliar. Dana itu bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah, hibah serta pendapatan lain-lain yang sah, alokasi bantuan keuangan, alokasi dana pusat setelah dipotong untuk dana alokasi khusus (DAK), termasuk pendapatan asli desa. Total dana itu mesti masuk ke APBDes. Di lain pihak, Gede Partadana mengatakan, dengan kian banyaknya uang masuk ke desa, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat desa membuat perencanaan pembangunan, pengalokasian dan pertanggungjawaban dananya. Dalam waktu dekat ini, aparat desa seluruh Bali dikumpulkan di Denpasar untuk mendapatkan pelatihan, menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban dana-dana desa itu.

Atas pertanyaan pendengar soal sistem pertanggungjawaban pemanfaatan dan pengawasan pemerintah, Subadra mengatakan pengawasannya melekat. Di lain pihak, Gede Partadana mengatakan kementerian keuangan juga melakukan pengawasan khusus terhadap penggunaan dana desa. Dana desa itu pencairannya dalam tiga tahap, tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen dari jatah, dan tahap akhir Oktober ini sisanya 20 persen. **(013)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 13

Bali Post

Hingga Oktober

Pendapatan Pariwisata Capai Rp 11 Miliar

Bangli (Bali Post)-

Realisasi pendapatan Pemkab Bangli dari sektor pariwisata tahun 2015 ini meningkat dibanding tahun 2014 sebelumnya. Sejak Januari hingga Oktober ini, realisasi pendapatan yang diperoleh dari retribusi wisata Kintamani mencapai Rp 11 miliar lebih. Sementara di bulan yang sama pada tahun sebelumnya, pendapatan pariwisata hanya sekitar Rp 6 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bangli Wayan Adnyana, Selasa (20/10) kemarin, mengatakan naiknya realisasi pendapatan tersebut terjadi karena banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bangli, khususnya Kintamani. Di mana hingga Oktober tahun ini jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 471.778 orang. "Wisatawan yang berkunjung kebanyakan wisatawan asing," terangnya.

Di samping itu, meningkatnya pendapatan tahun ini juga tidak terlepas dari adanya kenaikan harga tiket retribusi sebesar 200% yang diberlakukan mulai Januari 2015 lalu. Meski hingga Oktober ini realisasi pendapatan sudah mengalami peningkatan, namun Adnyana masih pesimis bisa memenuhi target pendapatan Rp 18 miliar dalam sisa waktu dua bulan ke depan. Untuk mencapai target tersebut pihaknya mengaku akan tetap berupaya keras.

Adnyana menambahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pihaknya sudah mulai menata kawasan Penelokan. Termasuk akan menambah fasilitas umum untuk kenyamanan wisatawan. Terlebih Penjabat Bupati Bangli sempat menargetkan kesembrawutan Kintamani tuntas akhir Oktober ini. **(kmb40)**

Bali Post/dok

Kawasan wisata Kintamani.

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 8

Bali Post

Inspektorat Cek Ruko Dikoskan

Negara (Bali Post) -

Pemkab Jembrana, Selasa (20/10) kemarin, menurunkan Inspektorat untuk menelusuri aset Pemkab Jembrana berupa ruko yang ada di terminal manuver Gilimanuk yang dijadikan tempat kos. Inspektorat juga menelusuri aliran dana dari hasil sewa ruko itu.

Dari keterangan yang dihimpun, setelah mendapat informasi ruko di terminal Manuver Gilimanuk ada yang disewakan untuk tempat kos, Asisten 1 Sekda Jembrana I Made Sudiada langsung memanggil Lurah Gilimanuk I Gede Ngurah Widiada. Lurah dimintai penjelasan terkait aset yang pemanfaatannya semestinya untuk berjualan menjadi rumah kos.

Berdasarkan data dari 30 ruko milik pemkab, yang dikontrakkan sebanyak 7 ruko dengan nilai Rp 5 ribu per hari atau Rp 150 ribu per bulan, sehingga pemasukan yang didapat Rp 1. 050.000 sebulan. Sementara uang hasil kontrakan yang semestinya masuk ke kas daerah tidak pernah disetorkan dan dikatakan untuk biaya kebersihan.

Sekda Jembrana Gede Gunadnya juga mengakui pihaknya menurunkan Inspektorat untuk memeriksa dan menelusuri kebenaran pengeloaan ruko itu. Menurut Gunadnya, pihaknya dalam melakukan penelusuran juga mengecek apakah ada kerugian daerah dari dikontrakkannya ruko tersebut. "Kami hanya ingin masalah ini *clear*," katanya.

Sementara itu Lurah Gilimanuk I Gede Ngurah Widiada ketika dikonfirmasi mengakui jika di bagian belakang kawasan pasar seni itu ditempati oleh sejumlah warga yang berdagang di sana. Saat ini ada 30 unit ruko yang beberapa di antaranya merupakan milik pribadi, dan yang berpelang Pemda merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Menurutnya dari puluhan ruko tersebut, hanya 7 unit ruko saja yang saat ini telah ditempati duktang. Pihaknya membantah telah memungut biaya sebesar Rp 150.000 per bulan. Pihak Kelurahan berdalih, pungutan tersebut dilakukan untuk biaya kebersihan.

Dikatakannya itu ada SK pengelolaan manuver yang di serahkan ke Kelurahan. "Masalah sewa Rp 150 ribu per bulan sudah kesepakatan dengan penyewa waktu masih lurah terdahulu," jelasnya. **(kmb)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015
Hal : 12

Bali Post

Korupsi Pavingisasi Gajah Mada

Terdakwa Dituntut Hukuman 18 Bulan Penjara

Denpasar (Bali Post) -

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pavingisasi Jalan Gajah Mada, Selasa (20/10) kemarin dituntut hukuman selama setahun enam bulan (18 bulan) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Kedua terdakwa yang duduk di kursi pesakitan itu adalah terdakwa Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerthi. Walau sidang dilakukan bersamaan, namun pembacaan tuntutan dilakukan berbeda.

JPU Agus Suraartha di depan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili dalam surat tuntutannya mengatakan bahwa terdakwa Alit Widhiadnyana tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer pasal 2 ayat 1. Namun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsider yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. "Menuntut supaya terdakwa Alit Widhiadnyana berupa pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," tuntut jaksa. Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Di samping tuntutan tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum itu, terdakwa Alit Widhiadnyana juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 200.541.795 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama selama satu bulan, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menuntupi uang pengganti tersebut. Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan dalam sidang pekan depan.

Tuntutan berikutnya kemudian dibacakan untuk terdakwa Ngurah Kosala Cakrawerthi. Tuntutan hampir sama. Hanya yang membedakan hanya uang pengganti, karena menurut jaksa, uang pengganti sebagai akibat kerugian negara sudah dibebankan pada Alit Widhiadnyana. Sama seperti Alit, Kosala juga akan melakukan pembelaan pekan depan. Di luar persidangan, JPU Agus mengatkan, dalam perkara ini terdakwa Alit sudah menitipkan uang sebagai akibat kerugian negara sebanyak Rp 200 juta. "Ya, sudah dititip di jaksa," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam dakwaan disebutkan dugaan korupsi proyek pavingisasi Gajah Mada Denpasar, diadili dalam berkas terpisah yakni untuk terdakwa Alit Widhiadnyana AS dan Ngurah Kosala Cakrawerti. Dalam perkara ini, diduga ada kerugian negara Rp 210.541.795 bedasarkan audit BPKP. Alit adalah Direktur PT Alit Wirajaya dan Ngurah Kosala Direktur CV Unika Design, konsultan pengawas dalam kegiatan pedestrian Jalan Gajah Mada.

Kasus ini berawal tahun 2012, yakni ditetapkannya Jalan Gajah Mada sebagai kawasan *heritage* selanjutnya dilakukan penataan pedestrian dengan anggaran Rp 3.150.000.000. Untuk memenuhi ini dilakukan tender, dan terdakwa Alit Widhianyana dengan penawaran Rp 2,5 miliar dinyatakan sebagai pemenang tender. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015

Hal : 5

Bali Post

Ranperda Riparda

Peta Riparda Tak Sejalandengan Perpres 51/2014

Denpasar (Bali Post) -

Perpres No.51 Tahun 2014 menjadi salah satu poin "mengingat" dalam Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) Provinsi Bali Tahun 2014-2029. Namun, keberadaan perpres ini justru tidak sejalan dengan peta riparda. Pasalnya, PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas mengharuskan peta tersebut mengacu pada Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali.

"Biro Hukum saja mengakui kalau terjadi pertentangan antara Perpres 51 dengan PP 50 di gambar. Cuma karena strata hukum, maka Perpres 51 wajib dimasukkan dalam poin 'mengingat'. Namun karena di batang tubuh Ranperda ini jelas menyebutkan kalau mengacu pada RTRWP maka gambar petanya, dipergunakanlah peta Perda 16," ujar anggota Pansus Ranperda Riparda DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. usai menggelar rapat pansus di gedung dewan, Selasa (20/10) kemarin.

Adhi Ardhana mengaku tidak mengerti mengapa Perpres 51 tetap dipertahankan keberadaannya dalam Ranperda Riparda. Mengingat, esensi dari Ranperda Riparda wajib mengikuti urutan peraturan di atasnya yakni PP No.50 Tahun 2011 tentang Riparnas. Dengan demikian peta Riparda jelas harus mengikuti Perda RTRWP Bali, meski kedudukan Perpres No.51 Tahun 2014 lebih tinggi daripada RTRWP.

"Saya tidak mengerti, makanya saya bilang lebih baik Perpres 51 tidak usah dipakai. Tidak nyambung, tidak ada gunanya," tegasnya. Lantaran peta Riparda mengikuti Perda RTRWP Bali, anggota Pansus lainnya, Ida Bagus Pada Kesuma mempermasalahkan sejumlah wilayah yang tidak masuk sebagai kawasan pariwisata. Padahal, di daerah-daerah itu telah dibangun fasilitas akomodasi seperti hotel.

"Tidak elok sekali kita tidak mengadopsi wilayah yang sedang berkembang. Contoh, wilayah Abiansemal tidak masuk kawasan pariwisata. Sedangkan di sana ada hotel banyak. Kalau itu tidak diakomodir, bagaimana Ranperda ini, seolah-olah kita tidak memerhatikan daerah yang sedang berkembang," paparnya.

Ketua Pansus Ranperda Riparda, I Wayan Rawan Atmaja, mengatakan, kawasan wisata seperti itu diatur di kabupaten/kota. Sedangkan isi Ranperda Riparda mengacu pada Perda No.16 Tahun 2009. Bila ingin memasukkan daerah yang belum masuk kawasan pariwisata, maka harus menunggu revisi Perda RTRWP tersebut.

"Apabila ada perubahan dari yang baru sekarang, data yang ingin dimasukkan itu bisa-bisa saja. Tetapi nanti itu dia berkoordinasi dengan kabupaten/kota masing-masing," jelasnya. Terkait Perpres 51, Rawan mengakui bila sudah ada rekomendasi dari Kementerian Pariwisata agar menanyakan kelanjutan Perpres itu ke Presiden Joko Widodo. Namun, hal ini menurutnya menjadi urusan Ketua DPRD Bali. Sebaliknya, Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama justru menyerahkan persoalan itu kepada Ketua Pansus.

"Tanya Ketua Pansus saja," ujarnya singkat usai menghadiri rapat Pansus Ranperda Riparda. Saat mengikuti rapat, kelanjutan Perpres 51 juga sempat ditanyakan Adhi Ardhana kepada dirinya. **(kmb32)**

Edisi : Rabu, 21 Oktober 2015
Hal : 7